

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tidak terlepas dari sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi dalam proses pertumbuhannya. Di awal pemerintahan Indonesia menerapkan sentralisasi dalam pemerintahannya. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang terpusat dimana kekuasaan ada ditangan pemerintah pusat. Krisis ekonomi yang melanda Asia dan kegagalan pemerintah di era sebelum reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis menyebabkan berubahnya sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Implikasi dari pergeseran paradigma ini adalah bergesernya kekuasaan pemerintahan yang semula berada di pusat kini berada di daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada masa pemerintahan Habibie yang direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Mudrajah kuncoro, 2014). Undang-undang tersebut kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberikan peluang pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya (A. Budijanto, 2016).

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memiliki pengertian yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi terbagi tiga, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi memiliki tujuan untuk pemeratakan pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Sistem desentralisasi menyebabkan setiap daerah berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah menjadi implikasi dari ditetapkannya desentralisasi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Otonomi daerah sudah berlaku di Indonesia pada masa orde lama dan orde baru, bahkan sejak

era kolonial Belanda dan Jepang dengan menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis, dan feudalist. Namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik (Mudrajah kuncoro, 2014). Pada era reformasi otonomi daerah mulai berjalan dengan baik. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk berkembang dengan potensi dan kearifan lokalnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuannya sama dengan desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Pembangunan dan kesejahteraan terkait satu sama lain. Menurut Ufira dan Rita (2016), peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan taraf hidup merupakan tujuan dari pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Otonomi daerah menjadi kesempatan yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah mengatur dan mengurus dirinya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (perpustakaan RI, 2014). Menurut Johara T. Jayadinata (1999) pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pembangunan mempunyai skala nasional, regional atau lokal. Pembangunan adalah proses yang direncanakan dan suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ke tingkat yang lebih maju dan lebih baik (Ufira dan Rita, 2016).

Dalam otonomi daerah pemekaran menjadi salah satu cara tercepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kaloh (2007) dalam Desmon eka chandra (2014), pemekaran wilayah yang dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru diharapkan daerah otonom dapat memanfaatkan peluang dalam mengurus wilayahnya sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan bantuan pemerintah pusat dan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat setempat.

Dalam RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023, ada enam calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB). Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang direncanakan akan dimekarkan menjadi Tasikmalaya Selatan yang

terdiri dari 10 kecamatan dengan ibu kota di Karangnunggal (Antara dan Ugo, 2022). Rencana pemekaran Tasikmalaya Selatan telah digagas sejak tahun 2009 namun terhalang oleh adanya moratorium pemekaran daerah yang berlaku sejak tahun 2014.

Menurut Marina dan Paskarina dalam Desmon eka chandra (2014), pemekaran daerah memiliki dua sisi kecenderungan, yaitu sebagai wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya dan di sisi lain mengundang kekhawatiran terhadap kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus rumah tangganya sendiri. Disisi lain potensi ekonomi daerah menjadi salah satu persyaratan dasar dalam pemekaran daerah. Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2023).

Analisis potensi wilayah telah diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tersirat. Tersirat dalam hal ini dapat diartikan peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan tersebut melalui analisis yang dapat menguraikan potensi-potensi daerah menjadi penunjang daya saing daerah dalam pelaksanaan pembangunan (Nurhakim, 2013). Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan atas pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Arsyad, 2004 dalam Rizani, 2017).

Untuk melakukan perencanaan dibutuhkan analisis untuk menentukan potensi wilayah yang ada. Widodo (2006) mengatakan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sektor ekonomi dimulai dengan melakukan identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi dari kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor yang mempunyai daya saing atau unggul dalam beberapa

periode terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa mendatang. Kedua, potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan dimasa mendatang walau belum mempunyai daya saing yang tinggi saat ini (Rizani, 2017).

Berkaitan dengan Rencana Kabupaten Tasikmalaya yang disiapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan, identifikasi potensi dari kegiatan ekonomi penting untuk segera dilakukan. Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi sektor pertanian dalam perekonomiannya. Menurut Francisca dan Rita (2019) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini selain sebagai penyedia makanan dan kebutuhan pokok untuk manusia juga menjadi penyedia bahan baku untuk sektor industri pengolahan, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, mata pencaharian sebagian besar penduduk dan memberikan cadangan devisa dari kegiatan ekspornya. Sektor pertanian juga terbukti memiliki ketahanan terhadap guncangan struktural dari perekonomian makro karena mampu bertahan dari krisis moneter tahun 1997 (Faqihuddin dkk, 2019). Sektor pertanian mampu menjadi pembangkit perekonomian dikala sulit akibat dari adanya keterkaitan ke depan dan kebelakang (*forward and backward linkage*) yang mendorong berkembangnya sektor perekonomian lain sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Pembangunan di Jawa Barat tercantum dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 yang menyatakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025, pertanian merupakan salah satu dari tujuh bidang unggulan sebagai penciri Jawa Barat termaju.

Rata-rata kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di kabupaten Tasikmalaya tahun 2010-2021 adalah 36,07 persen dan masuk ke dalam Sektor maju dan bertumbuh pesat dan menjadi Sektor unggulan serta memiliki potensi untuk berkembang di wilayah kabupaten Tasikmalaya (Rizki dan Risna, 2022).

Menurut Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, hasil produksi sub Sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan sub Sektor penyumbang terbesar. Disamping itu, sub Sektor tanaman pangan dan hortikultura mencakup komoditas pokok yang penting bagi kehidupan manusia. Produksi komoditas tanaman pangan di 10 kecamatan CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan (Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Cibalong, Parungponteng, Bantarkalong, Bojongasih, Culamega) tahun 2018-2022 terdapat di lampiran 1-5, produksinya berfluktuatif setiap tahunnya, ada yang mengalami pertumbuhan positif, ada yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2022 memiliki kontribusi 29,51 persen terhadap produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Kontribusi komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan terhadap Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 yaitu, 29,09 persen, 36,46 persen, 73,78 persen, 26,03 persen, 100 persen, 26,69 persen, dan 31,37 persen.

Menurut (RPJDM) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, capaian kinerja pembangunan bidang pertanian dalam produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020 sudah melampaui target kinerja, sementara pada produksi hortikultura dan perkebunan belum melampaui target kinerja di tahun 2016-2020. Luas panen padi di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah 108.021 hektar dengan produksi padi adalah 733.861 ton. Sedangkan untuk palawija luas panen terluas adalah komoditas jagung yaitu 3.571 hektar dengan produksi 24.395 ton (Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2023). Menurut Hendayana (2003) untuk mencapai pembangunan ekonomi yang efisien dapat dilakukan dengan mengembangkan suatu komoditas unggulan wilayah tersebut sehingga memberikan manfaat terhadap ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Kondisi pangan yang

kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional (Bulog, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi komoditas tanaman pangan unggulan di beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang disiapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan. Dengan mengetahui komoditas tanaman pangan unggulan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah yang akan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam perencanaan sub sektor tanaman pangan sehingga arah pembangunan dan pengambilan kebijakan dimasa depan dapat lebih optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara sistematis penelitian ini membahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Komoditas tanaman pangan apa saja yang memiliki keunggulan komparatif di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan?
2. Bagaimana pergeseran posisi dan potensi komoditas tanaman pangan di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan?
3. Komoditas tanaman pangan apa saja yang memiliki keunggulan kompetitif di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan?
4. Komoditas tanaman pangan apa saja yang merupakan komoditas unggulan (memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini. yaitu:

1. Mengetahui komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan.
2. Mengetahui pergeseran posisi dan potensi komoditas tanaman pangan di masa depan dan pergeserannya di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

3. Mengetahui komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan.
4. Mengetahui komoditas tanaman pangan unggulan (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) di CDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai komoditas unggulan tanaman pangan, sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi.
2. Bagi pemerintah, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penetapan arah pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang diambil khususnya pada komoditas tanaman pangan.
3. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut serta perbandingan penelitian dimasa yang akan datang.